

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Politik Dalam Alkitab

#### 1. Politik Dalam Perjanjian Lama

##### a. Sistem Politik Teokrasi

Dalam Perjanjian Lama, secara khusus di zaman nabi Musa pemerintahan bangsa Israel berbentuk teokras dimana Allahlah yang memerintah atas bangsa. Meskipun Musa, Harun dan Yosua yang memimpin bangsa itu, tetapi mereka bertindak sesuai dengan ketetapan Allah.<sup>11</sup> Tuhan memilih langsung Musa untuk menjadi pemimpin Bangsa

Israel dan mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan (Kel.3:10). Musa merespon panggilan itu dengan berkata bahwa ia bukanlah pembicara yang baik, tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia yang akan memampukan Musa (Kel. 4:10-11, 13) dan Tuhan membiarkan Harun yang merupakan kakak Musa untuk membantunya sebagai Juru bicara.<sup>12</sup>

Banyak hal yang harus dihadapi Musa dalam kepemimpinannya, mulai dari awal pembicaraannya dengan raja Firaun (Kel. 5:19-21) sampai pada peperangan melawan Midian menjelang kematiannya (Bil. 31:14-

---

<sup>11</sup> Josanti dan Aldrin Purnomo Yudhi Sanjaya, "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4," *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 4-5.

<sup>12</sup> Stephen M. Miller *Tokoh & Tempad dalam Alkitab* (Jakarta: Gunung Mulia, 2017) 306-307.

16). Bangsa Israel merupakan bangsa yang bebal, mereka melanggar perjanjian-perjanjian, menolak Allah sebagai pemimpin mereka melalui pemberontakan kepada Musa dan Harun, Bahkan keluarga Musa sendiri pun tidak setia (Kel. 32:1). Tetapi karena kesetiaan Musa kepada Allah ia mampu menghadapi tekanan-tekanan baik dari bangsa Israel maupun keluarganya sendiri, "Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi" (Bil. 12:3).

Musa terus mendokan bangsa Israel kepada Allah (Bil. 14:5-9). Dalam keterbatasannya sebagai seorang pemimpin, Musa tidak putus asa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk dan pemberontak. Sekalipun berat bagi Musa, tetapi ia tetap semangat bekerja bagi nama Allah (Bil. 14:13). Dalam kepemimpinan Musa memperlihatkan bahwa Ia memimpin umat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Musa tetap berdasar pada kebenaran yaitu otoritas Allah.<sup>13</sup>

Politik teokrasi (Politik dalam Gereja) adalah sistem berpolitik yang dalam praktiknya berdasar pada kebenaran serta kehendak Allah. Politik teokrasi ini hendak menegakkan kedaulatan Allah sebagai Raja, menegakkan kedaulatan Allah berarti mengerjakan kehendak-Nya di dunia. Dalam konteks sistem politik teokrasi, Firman Allah dan

---

<sup>13</sup> Philip Sombuala Buulolo dan Kres Ari Kawalo, "Peranan Kepemimpinan Musa Dan Aplikasinya Bagi Pemimpin Gereja Masa Kini" *Jurnal Agape* Vol. 1 (2022) 7-8.

kebenaranlah yang harus menjadi sebuah landasan serta prinsip di dalam bertindak dan dalam pengambilan kebijakan.<sup>14</sup>

Musa telah menunjukkan sistem pemerintahan yang baik dan benar dalam masa pemerintahannya. Sebagai seorang pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tempat perbudakan, Ia tetap fokus pada kebenaran yaitu suara Tuhan, sekalipun di tengah keterbatasannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Platon bahwa dasar dari negara yang ideal adalah kebenaran. Sebagaimana akal mengatur tubuh demikianlah seharusnya seorang pemimpin mengatur negaranya.

#### b. Sistem Politik Monarki

Sistem Politik Monarki dalam Perjanjian Lama merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja, nabi dan kaisar. Ada beberapa Kiprah tokoh PL dalam Politik diantaranya;

##### 1) Tokoh Hizkia

Hizkia merupakan salah satu raja yang setia kepada Tuhan. Sekalipun karena pengaruh kepemimpinan ayahnya sebelumnya membuat bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Hizkia mampu membawa umat untuk mencari Tuhan kembali. Ia tidak menyetujui praktik penyembahan berhala, dan juga ritual seks yang seringkali

---

<sup>14</sup> Adi Putra, "Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja," *Review Politik* 3, no. 1 (2023): 79.

dilakukan umat Israel. Hal yang pertama dilakukan Hizkia ketika menjadi raja ialah menghancurkan mezbah penyembahan berhala diseluruh negeri, ia memberontak kepada Asyur serta tidak takluk kepadanya (2Raj. 18:5-7). Hizkia tidak menyimpang dari Allah, dia setia memegang perintah-Nya dan Allah pun menyertai Hizkia.<sup>15</sup>

Hizkia juga dikenal sebagai salah satu raja dalam sejarah Yahudi yang paling beriman. Hal ini dapat terlihat dengan jelas ketika Hizkia berusaha mengembalikan umatnya dalam penyembahan kepada Allah. Kerendahan hatinya juga terlihat ketika ia mengakui bahwa ia bersalah (2Raj.18:14). Di tengah kecaman raja Asyur pada masa itu, Hizkia tetap tangguh serta berani untuk menegakkan kebenaran. Kepatuhannya kepada Tuhan memperlihatkan kepemimpinan yang berintegritas. Ia juga berlaku adil sebagaimana yang Allah kehendaki untuk ia lakukan dan ia pun memperoleh penyertaan Allah. ia sosok pemimpin yang senantiasa bersumber pada kebenaran (2Raj. 18:4-7; 20:3-6).<sup>16</sup> Sikap kepemimpinan Hizkia seharusnya menjadi tolak ukur untuk para pemimpin di masa kini. Di tengah keterbatasan Hizkia menghadapi tekanan-tekanan ia tetap menjadi pemimpin yang baik dan benar untuk rakyatnya.

---

<sup>15</sup> Miller, *Tokoh Dan Tempat Dalam Alkitab*, 201.

<sup>16</sup> Suang Manik, "Penerapan Konsep Kepemimpinan Yang Baik dan Benar di Hadapan Tuhan Melalui Kepemimpinan Raja Hizkia Berdasarkan Kitab 2 Tawarikh 29:12, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol 1 No. 2 (2023) 220.

## 2) Tokoh Nehemia

Nehemia merupakan seorang pencicip anggur kerajaan. Dirinya sangat dipercaya karena membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan oleh tentara Babel tahun 586. Hal itu membuat Nehemia berpuasa, berkabung dan berdoa dan meminta izin kepada raja untuk membangun kembali tembok itu dan raja pun setuju. Dalam lima puluh dua hari tembok pun sudah berdiri kembali, hal ini membuat kelompok oposisi non-Yahudi merasa ketakutan. Tetapi Nehemia berkata bahwa pekerjaan itu terselesaikan karena bantuan Allah mereka (Neh.6:16).<sup>17</sup>

Dari proses pembangunan kembali tembok Yerusalem, Nehemia dapat memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang hebat. Dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang bupati, Nehemia menunjukkan integritasnya dengan sikapnya yang tidak mencari keuntungan (Neh. 4:14-19). Sejak tahun ke 20-30 Nehemia diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda dengan dua pemerintahan Artahsasta dimana sudah 12 tahun lamanya Nehemia menjadi bupati dan tidak pernah mengambil dari hak seorang bupati (Bdk 4:14).

Nehemia juga menunjukkan kesetiiaannya terhadap hukum, yang ditandai dengan pembacaan bagian-bagian dari kitab Musa yang didengarkan langsung oleh rakyat (Neh. 13:1). Nehemia juga

---

<sup>17</sup> Miller, *Tokoh Dan Tempat Dalam Alkitab*, 232.

memperlihatkan kepemimpinannya yang mampu mendengarkan, serta merespon keluhan dari bangsa yang dipimpinnya dengan tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Tidak lepas dari itu, Nehemia juga merupakan seorang pemimpin yang biasa disapa sebagai seorang pendoa.<sup>18</sup> Melalui masa pemerintahan Nehemia dapat dilihat bahwa kualitas seorang pemimpin sangat menentukan kondisi negara yang ideal atau tidak.

### 3) Tokoh Ezra

Sekitar 100 tahun sesudah pembuangan kembali pulang dan mulai kembali membangun bangsa mereka, suatu kelompok baru dipimpin oleh Ezra. Ada hampir 24 ton perak dan 4 ton emas disediakan oleh Artahsasta raja Persia dan Ezra mempunyai rencana untuk merekonstruksi kejayaan Bait Suci serta melengkapinya dengan perkakas yang terbaik. Ezra juga mendapat sebuah kekuasaan dari raja untuk mejadi pemerintah bagi semua orang dibagian Barat sungai Efrat serta mengajari mereka tentang hukum Yahudi.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Israel pasca pembuangan, Ezra secara aktif mempromosikan pentingnya hukum serta perintah taurat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilihat berdasarkan usaha Ezra

---

<sup>18</sup> Felisia Nanda Uli Boangmanalu dan Ibelala Gea Lestari Br Silaban, "Kepemimpinan Nehemia Yang Revolusioner Dan Relevansinya Bagi Pemimpin Masa Kini," *Pastoral Kateketik* 9, no. 1 (2023): 108–110.

<sup>19</sup> Miller, *Tokoh Dan Tempat Dalam Alkitab*, 138-139.

untuk menegakkan kebenaran yaitu hukum Allah (Ezr. 7:6, 10; Ezr. 7:25-26). Akhir dari kitabnya, Ezra memberikan sebuah perintah kepada umat Israel agar menjauhkan diri terhadap pernikahan campur, hal ini menunjukkan ketaatan Ezra terhadap aturan yang ada.<sup>20</sup>

Belajar dari kepemimpinan Ezra berdasar kepada kebenaran tentunya memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat dimasa itu. Melalui ketaatan Ezra sebagai seorang pemimpin, membuat Allah memberikan bimbingan dan petunjuk yang konkret bagi masyarakat Israel. Dasar kebenaran dalam kepemimpinan sangatlah penting dan hal inilah yang dimaksudkan oleh Plato, bahwa kebenaran (Ide) merupakan syarat untuk menciptakan negara yang ideal.

## **2. Politik dalam Perjanjian Baru**

### **a. Yesus dan Politik**

Sejak kecil sampai dewasa Yesus sudah hidup dengan sistem politik orang Yahudi, (Luk. 2:21) "Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya". Kemudian (Luk. 2:47) saat

Yesus berusia 12 tahun para Ahli Taurat mendapati Ia di Bait Tuhan

---

<sup>20</sup> Andreas Yonatan Gultom dan Timotius Toni Simajuntak, "Analisis Kedaulatan Allah Yang Mengalir Bagi Umat-Nya Melalui Pribadi Ezra Dalam Konteks Ezra 1:1-6," *Pendidikan Agama dan Filsafat* 2, no. 1 (2024): 92.

sehingga Ia dikatakan sebagai Anak yang cerdas, yang berarti Yesus disiplin dalam pendidikan serta perintah Taurat. Setelah Ia dewasa dan memasuki dunia pelayanan (Mat.20:25-28) Ia memberikan sebuah pengajaran mengenai pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan dan hamba. Yesus membuktikan diri-Nya sebagai seorang Tokoh sekaligus pengamat politik kerajaan Romawi dimasa itu. Dimana sistem pemerintahan saat itu secara otoriter, adanya jalur politik yang tidak bermoral, dan tidak melayani demi kesejahteraan.

Yesus sangat memahami bagaimana kekuasaan Roma, Saduki dan kaum Farisi saat memegang pemerintahan dan hal ini juga mempengaruhi pengajaran Yesus (Mark. 10:42). Politik Yesus bukanlah politik praktis, sebab Ia tidak mendirikan partai politik, dan tidak turut dalam gerakan Zelotisme diabad pertama untum melawan pemerintahan Romawi.<sup>21</sup> Tetapi dapat dilihat dari kehidupan Yesus sebagai tokoh pembaharu dan tokoh politik, Yesus tampil berbeda di tengah para politikus, politik-Nya merupakan politik hati nurani, mengabdikan serta melayani orang-orang yang tertindas, tidak memanipulasi demi kepentingan-Nya. Bahkan Yesus rela mengorbankan diri-Nya sendiri

---

<sup>21</sup> Parel T.J dan Maidiantius T.J, *Politik Yesus Bagi Indonesia*, (Tangerang, 2014): 3639.

daripada harus mengorbankan orang lain demi menegakkan kebenaran dan itulah politik salib.<sup>22</sup>

Politik Yesus dapat dilihat dari beberapa sikap-Nya yang dijelaskan di dalam Alkitab diantaranya; sikap-Nya terhadap para penguasa, dimana Ia menolak tindakan keras dari penguasa Romawi, Yesus menhardik Herodes bahkan menyebutnya sebagai Serigala (Luk.13:32). Yesus Pun meminta agar para murid-muridNya turut mendokan para penguasa agar memimpin dengan kebenaran, kejujuran, keadilan dan ketulusan (Mrk.10:42-45). Kemudian sikap Yesus kepada orang Farisi dan ahli taurat, Yesus menegur mereka sebagai orang yang munafik (Mat. 23:27), sebagai orang neraka dan seringkali menghitung kejahatan yang mereka lakukan (Mat 23). Yesus melawan tindakan mereka yang tidak lagi sesuai dengan ajaran agama dan sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Dan sikap Yesus terhadap orang Miskin, Yesus hadir memberi semangat baru kepada mereka (Mat. 5:3), Yesus membela hak-hak mereka (Mat. 9:36). Yesus mempunyai belas kasih tanpa batas kepada orang-orang yang miskin dan tertindas.<sup>23</sup>

Sikap politik Yesus juga dapat dilihat saat seseorang bertanya apakah pantas untuk membayar pajak kepada para pemerintah, dan

---

<sup>22</sup> Ivan Sampe Buntu, "Yesus Sang Politikus Sejati: Suatu Kajian Sosiologis Teologis Tentang Bagaimana Sikap Politik Yesus Serta Implementasinya Terhadap Kehidupan Gereja" (Skripsi, Sekolah Tinggi Teologi Rantepao, Toraja, 2002) 124.

<sup>23</sup> Ibid., 64-72

Yesus merespon dengan berkata bahwa “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Mat.22:21). Disini Yesus hendak mengajarkan bahwa ada hubungan antara agama dan negara, dan setiap orang harus bertanggung jawab baik kepada agama maupun kepada negara.<sup>24</sup> Dalam (Mat. 9:2-13; Mark.2:13-17; Luk. 5:27-32) Yesus ingin memperlihatkan bahwa politik sebagai dunia pelayanan. Hal ini dapat dilihat ketika Yesus justru bergaul dengan kalangan pemungut cukai, bahkan ada satu mantan koruptor pemerintahan Roma untuk memungut pajak dan menjadi murid Yesus (Luk. 9:9).

Yesus memberikan teladan bahwa lingkungan apapun termasuk dalam dunia politik adalah tempat untuk melayani. Kemudian (Mat. 5:13-16) Yesus memberikan pengajaran agar semua orang percaya haruslah menjadi terang dan garam dunia, yang berarti orang percaya harus berpengaruh, serta menghadirkan kerajaan Allah baik dilingkungannya termasuk dalam berpolitik. Kerajaan Allah (Kerajaan Sorga) menjadi penekanan di dalam kitab Injil, hal ini menandakan ada penegasan dari Allah bahwa kedatangannya ialah untuk mendatangkan Kerajaan Allah itu. Yesus telah menunjukkan cara berpolitik yang baik dan benar, sangat

---

<sup>24</sup> Ferdinan Samuel Manafe, “Sikap Kristen Dalam Arena Politik” *Jurnal Missio Ecclesiae* Vol. 6 No. 1 (2017) 6-7.

besar peluang yang bisa Yesus gunakan untuk menjadi penguasa saat Ia berada di dunia, tetapi Ia memilih untuk tidak melakukannya.<sup>25</sup>

Yesus sendiri menyatakan bahwa tujuan politik-Nya ialah untuk mendatangkan kesejahteraan. Hal ini Ia proklamirkan melalui agenda politik (Luk. 4:18-19), kesejahteraan yang Yesus sampaikan akan menjadi bahagian orang yang mau mempraktekkan pesan politik-Nya. Tentunya sistem politik yang Yesus maksudkan ialah untuk menjacapai negara yang ideal, dimana berdasar kepada kebenaran.

#### b. Paulus dan Politik

Pandangan Paulus terhadap politik dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai keturunan Yahudi *original*, tarsus dan Sisilia tempat kelahirannya. Kewarganegaraan Paulus adalah Roma. Pada mulanya Paulus (Saulus) tidak menyukai ajaran Yesus serta menentang pengajaran tersebut dengan melakukan penganiayaan terhadap kepada umat Kristen, sampai pada akhirnya ia bertobat. Pada masa Paulus, masyarakat yang beragama Kristen di Roma diperhamba oleh kekaisaran Romawi. Akibat dari penindasan tersebut membuat umat begitu mengharapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Untuk itulah Paulus berupaya mengembalikan umat agar mewujudkan suatu pola kehidupan praktis orang Kristen dalam berpolitik.

---

<sup>25</sup> T.J, *Politik Yesus Bagi Indonesia*, 43-49.

Itulah sebabnya Paulus berbicara mengenai kuasa-kuasa lain yang melakukan kejahatan, ia menyebutnya sebagai; penguasa-penguasa dunia dan pemerintah-pemerintah, hal ini hendak memberikan pengertian mengenai pengajaran Paulus yang berhubungan dengan pemerintahan. Paulus beranggapan bahwa pemerintah merupakan hamba Allah (Rom. 13:4). Kata "hamba" dalam bahasa aslinya *diakonos* yang berarti seorang pelayan atau hamba.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba haruslah taat kepada sumber kebenaran yaitu Allah. pemerintah yang disebut sebagai hamba haruslah menyadari bahwa dirinya merupakan seorang pelayan di dalam negara, dan mempunyai tugas tanggung jawab yang besar. Kesadaran akan tanggung jawab tersebut haruslah berdasar pada kesetiaan dan kebenaran, dimana seorang hamba tidak mementingkan dirinya sendiri.

Paulus juga menyuruh agar umat Tuhan berdoa bagi pembesar-pembesar dan raja-raja, agar umat-Nya bisa hidup tenang, tentram, hidup dalam kesalehan serta kehormatan (1 Tim. 2:1-2). Ayat ini hendak memberikan sebuah indikasi bahwa politik bagi Paulus mempunyai tujuan akhir, yaitu menciptakan kesejahteraan, ketentraman dan ketenangan bagi seluruh umat manusia. Tokoh praktisi politik Kopong Tuan dari kalangan Gereja Khatolik menyebutkan, hal yang menjadi

---

<sup>26</sup> Yudhi Sanjaya, "Teologi Politik: Politik Praktis Orang Percaya Menurut Roma 13:1-4", 3.

prioritas dalam berpolitik ialah penataan negara yang tujuannya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia.<sup>27</sup>

### 3. Gereja Dan Politik

Pemahaman mengenai politik masyarakat Kristen Indonesia sejak awal bersifat negatif. Hal ini disebabkan tidak masuknya lembaga zending Eropa yang berlatar belakang RMG dan NZG dari gereja Uniert di Jerman merupakan orang-orang yang sangat kental dipengaruhi oleh politik Pietisme. Dimana mereka beranggapan bahwa politik itu duniawi, kotor serta tidak sesuai dengan hakikat Injil, yakni kasih. Tetapi pemahaman terhadap politik itu mengalami perubahan yang diawali oleh seorang tokoh politisi sekaligus pendeta dari kalangan Gereformeerd bernama Pdt. Basoeki Probowinoto beranggapan bahwa umat kristen yang melawan pemerintah berarti melawan Allah, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah.<sup>28</sup>

Secara tidak langsung teologi politik memberikan refleksi terhadap Gereja dan negara, dimana Gereja tidak hanya berhubungan terhadap keimanan akan tetapi terhubung juga terhadap politik di dalam negara. Gereja diutus untuk terlibat secara langsung dalam masyarakat dengan membawa imannya untuk masuk dalam kehidupan sehari-hari, untuk taat dan mematuhi pada setiap aturan-aturan yang telah terbentuk. Gereja juga perlu turut bergumul dan

---

<sup>27</sup> T.J, *Politik Yesus Bagi Indonesia*, 21.

<sup>28</sup> Richard M. Daulay, *Agama & Politik Di Indonesia Umat Kristen Di Tengah Kebangkitan Islam* (Jakarta: Gunung Mulia, 2015): 89-100.

berupaya mengatasi ketidakseimbangan sistem pemerintahan yang ada. Warga gereja yang merupakan warga negara harus memahami bahwa teologi politik merupakan bentuk penataan, bagaimana hidup bergereja dan bermasyarakat dengan baik.<sup>29</sup>

Ada model pendekatan Gereja Khatolik mengenai sikap Gereja dalam berpolitik diantaranya; Pertama, Gereja harus bertindak untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak dihargai atau justru ditolak oleh masyarakat tersebut. Kedua Gereja harus memfokuskan aktivismenya kepada kesejahteraan masyarakat, secara khusus bagi orang-orang yang tertindas baik itu karena tatanan politik maupun kultural. Ketiga, gereja harus menghargai setiap kebebasan religius serta pembatas antara Gereja dan negara terlebih dalam demokrasi pluralistik. Kemudian yang keempat, Gereja harus tetap mempertahankan kemerdekaannya dan keasinannya, sehingga tetap bersikap netral, sehingga Gereja tetap melayani Allah dan kepentingan umum.<sup>30</sup>

Oleh sebab itu, Gereja tidak hanya sekedar lembaga ritual agama Kristen, tetapi sebuah alat yang telah Tuhan hadirkan dalam dunia untuk menjadi saksi kerajaan Allah, mengenai kasih, keadilan dan kesejahteraan. Karena itu Gereja dipanggil untuk turut mengerjakan transformasi baik itu kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Gereja berfungsi sebagai politik moral untuk

---

<sup>29</sup> Djois Anneke Rantung, "Teologi Politik Untuk Keadilan Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas," *Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 7. <sup>30</sup> Glen H. Stassen dan David P. Gushee, *Etika Kerajaan Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini* (Surabaya: Momentum, 2008): 633.

membina warga jemaat bahkan masyarakat untuk terciptanya negara yang berdasar atas kebenaran dan keadilan.

## **B. Politik Platon**

### **1. Latar Belakang Pemikiran Platon**

Plato merupakan salah satu dari filosof Yunani terbesar yang akhirnya menjadi cikal bakal filosof politik Barat, metafisika dan etika. Platon lahir sekitar tahun 427 SM kemudian meninggal pada tahun 327 SM. Ia dilahirkan dalam keluarga Aristokrat Athena yang keturunannya berperan penting dalam kehidupan politik di Athena. Ayah Platon bernama Ariston, yang merupakan keturunan bangsawan raja Kodrus. Dan ibunya bernama Perictione keturunan Solon, dan seorang tokoh legendaris serta negarawan agung Athena. Nama Platon sebenarnya ialah Aristokles tetapi diberi julukan Plato (lebar) oleh pelatih senamnya, sebab ia mempunyai bahu dan dahi yang lebar.<sup>30</sup>

Platon sangat mengagumi Sokrates sejak masa mudanya, hal ini membuat Platon sangat dipengaruhi olehnya.<sup>31</sup> Platon juga terkenal sebagai pemikir politik hal ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga Platon yang banyak berhubungan dengan kaum elit politik secara khusus ketika bergabung dalam kelompok 30 *Tyrannoi* (Thirty Tyrans). Awalnya Platon hendak bergabung dengan para kerabatnya Oligarki (Dunia Politik), akan

---

<sup>30</sup> Andariati, "Filsafat Politik Plato", 101.

<sup>31</sup> K. Berken, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 12-14.

tetapi ketika Platon melihat Oligarki itu mulai menggunakan kebijakan dengan kekerasan secara khusus pembunuhan yang dilakukan kepada Socrates, Platon menjadi jijik terhadap mereka.<sup>32</sup> Akhirnya kiprah politik Platon memudar sesudah peristiwa Sokrates yang dibunuh oleh rezim penguasa pada masa itu.

Platon merasa kecewa karena socrates menerima hukuman yang tidak adil dari para pemerintah demokratis masa itu. Karena itulah lahir gagasan Platon mengenai pentingnya seorang filosof berkuasa secara ideal. Melalui peristiwa yang dialami oleh Sokrates, Platon menilai adanya sistem pemerintahan yang tidak benar serta kebobrokan moral para penguasa. Akhirnya ia melakukan pengembaraan dan memberikan pengajaran tentang filsafat, politik, pendidikan dan teologi dan salah satu karya terbaik Platon ialah mengenai negara yang ideal dan adil.<sup>34</sup>

Pemikiran politik Platon merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadinya, pengaruh Socrates, tradisi politik Yunani Kuno dan keinginannya untuk menciptakan negara yang lebih baik. Platon prihatin dengan kemerosotan moral dan politik yang ia saksikan di Athena. Itulah sebabnya ia ingin menciptakan negara yang adil, bijaksana dan harmonis. Ia juga percaya bahwa filsuf mempunyai peran penting dalam memimpin negara menuju kebaikan. Platon meyakini bahwa para filsuf memiliki

---

<sup>32</sup> Frederick Copleston, *Filsafat Plato* (Yogyakarta: BASABASI, 2020) 8

<sup>34</sup> Andariati, "Filsafat Politik Plato", 104.

pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerintah secara efektif.

## 2. Konsep Negara Ideal Platon

Konsep pemikiran Platon mengenai negara yang ideal didasari atas rasa kecewanya terhadap negara yang dijadikan alat untuk memuaskan para penguasa. Hal ini membuat Platon menilai buruk sistem pemerintahan yang ada dimasa itu sehingga membuat negara rusak. Tetapi baginya sistem pemerintahan itu dapat tertolong jika dasar hidup dan sistem pemerintahan tersebut diubah sehingga tercipta negara yang ideal. Konsep negara ideal ini merupakan implikasi filosofis dari doktrinnya yang terkenal yakni Forma. Forma dalam bahasa Yunani *Eidos* atau Idea, dan dalam bahasa Latin *Formae* mempunyai arti kesempurnaan dan hal yang tidak bisa berubah. Forma/ide ini bersifat abadi dan hanya bisa diakses melalui intelek bukan melalui indra. Adapun karakteristik utama dari Forma/ide bagi Platon ialah; kekal, tidak berwujud, sempurna, universal, hanya dapat diakses melalui intelek, inilah *Intelegible* yang Platon maksudkan<sup>33</sup>

sedangkan dunia fisik/indra atau *Insibel* hanyalah bayangan atau refleksi yang tidak sempurna dari alam forma/ide. Hal-hal yang manusia rasakan dengan indra akan terus berubah dan membusuk, tetapi forma/ide akan

---

<sup>33</sup> Nuthpaturahman, "Epistemologi Idealisme Plato; Implikasinya Terhadap Lahirnya Teori Fitrah Dalam Pendidikan Islam" *Jurnal Kopertais XI Kalimantan* Vol. 15, No. 28 (2017) 3.

abadi dan tidak berubah. Platon memberikan contoh dari forma/ide seperti; ide keindahan, ide keadilan dan ide cinta, hal-hal ini seharusnya bersifat sempurna dan abadi. Forma/idea menjadi dasar bagi pemikiran politik Platon tentang bagaimana seharusnya negara dan masyarakat diatur. Idea menyediakan kerangka moral dan intelektual bagi pemikiran politik, dengan memahami idea para pemimpin dan warga negara dapat bekerja sama untuk mencapai negara yang adil, bijaksana dan baik. Platon juga dalam politiknya menekankan bahwa peran pendidikan sangat berperan dalam upaya membangun negara yang ideal.<sup>34</sup>

Untuk itulah Platon beranggapan bahwa sistem pemerintahan haruslah berdasar terhadap idea. Dimana pemerintah harus mendidik warga negara untuk memiliki budi yang bersumber pengetahuan dan kebenaran. Dan ia berpendapat bahwa negara yang ideal merupakan negara yang diperintah oleh seorang filosof untuk menuju kepada kebajikan dan tercapainya suatu negara yang baik jika negara itu dipimpin oleh akal seperti kepala mengatur tubuh. Selanjutnya pada hakikatnya negara ideal bagi Platon merupakan negara yang di dalamnya memiliki relasi kekeluargaan untuk saling melengkapi serta tercipta kerukunan dan keharmonisan. Salah satu problematika penting dalam negara adalah keselamatan semua orang, baik

---

<sup>34</sup> A. Setyo Wibowo, *PAIDEIA: Filsafat Pendidikan-Politik Platon* (Yogyakarta: Kanisius, 2017) 279-282.

yang memerintah maupun yang diperintah untuk itu diperlukan pengorbanan, kearifan, keadilan, pengendalian diri dan kedamaian.<sup>35</sup>

### 3. Etika Politik Platon

Platon hidup saat sistem politik di Athena buruk, hal ini diakibatkan oleh rezim demokrasi yang berlaku saat itu hendak membawa Athena pada kehancuran. Platon menggambarkan kondisi yang terjadi saat itu sebagai anarkisme : relativisme moral, dimana seorang anak tidak lagi memiliki sopan santun dan orang tua tidak menggunakan otoritasnya dengan baik, dan relativisme hukum yang mengakibatkan penggunaan kebebasan yang keliru, sehingga diberi toleransi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi anarkis, karena kehilangan prinsip yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengomando tatanan.<sup>36</sup>

Platon mengkritik sistem politik Demokrasi yang ada di Athena. Baginya demokrasi merupakan rezim yang berdasar pada kebebasan dan toleransi ternyata identik dengan anarkisme. Sehingga kebebasan dalam sistem demokrasi menjadi kebablasan dan menghasilkan pemerintahan yang *epithumia* (hasrat yang tidak terbatas). Itulah sebabnya seringkali terjadi legitimasi kekuasaan melalui Pemilu, dimana donasi-donasi kampanye menjadi sarana bagi para oligark modal, agar hasrat mereka terpenuhi

karena melalui donasi kampanye para pemodal dapat menyetir para

---

<sup>35</sup> Ibid., 10-107.

<sup>36</sup> A. Setyo Wibowo, *PAEDEIA: Filsafat Pendidikan-Politik Plato* (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

penguasa politik. Dapat diartikan bahwa demokrasi rezim mempunyai prinsip utama yaitu kebebasan untuk memenuhi hasrat dari masing-masing orang sehingga terjadi kekacauan moral, dan sistem demokrasi inilah yang ditolak oleh Platon.

Itulah sebabnya politik Platon berpusat pada gagasan negara yang ideal, dimana sebuah masyarakat yang adil, harmonis, dan dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam karyanya, terutama *Republik* dan *Hukum*, plato menguraikan konsep etis yang menjadi fondasi bagi negara ideal tersebut.<sup>37</sup>

a. Tiga Jiwa Manusia dan Peran Sosial

Platon membagi jiwa manusia menjadi tigabagianyaitu; Jiwa rasional (akal), jiwa semangat (keberanian), dan jiwa nafsu (keinginan). Setiap jiwa mempunyai kecenderungan dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Jiwa rasional (akal) berada di kelas penguasa atau filsuf, yang bertanggung jawab untuk memerintah dan menentukan kebijakan berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan tentang bentuk ideal. Kemudian jiwa semangat (keberanian) mewakili kelas penjaga, yang bertugas melindungi negara dan menegakkan hukum dengan penuh keberanian dan dedikasi. Dan jiwa nafsu (keinginan) merupakan ciri khas kelas produsen, yang menyediakan kebutuhan material bagi masyarakat dengan mengikuti dorongan untuk bekerja dan menghasilkan.

b. Keadilan dan Kebahagiaan

---

<sup>37</sup> Ibid., 27-37

Bagi Platon, keadilan terwujud ketika setiap individu dan kelas sosial (3 jiwa) memenuhi peran yang sesuai dengan kemampuannya. Dimana penguasa/filsuf dengan jiwa rasional memimpin negara dengan kebijaksanaan, dan penjaga dengan jiwa semangat melindungi masyarakat dengan keadilan, serta produsen dengan jiwa nafsu menyediakan kebutuhan material dengan kesederhanaan. Keadilan menurut Plato tidak hanya sebatas memperlakukan semua orang sama, tetapi juga tentang memberikan kepada setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan. Hal ini berarti bahwa tidak semua orang akan melakukan pekerjaan yang sama atau memiliki kekuasaan yang sama.

Seperti kalimat Platon tentang keadilan, "*Justice means minding one's own business and not meddling with other men's concerns.*"<sup>38</sup> Negara yang adil bagi Platon adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Dimana totalitas kebahagiaan adalah ujud dari kebahagiaan setiap individu. Dan perlu diketahui bahwa peran pendidikan sangat penting dalam mencapai kebahagiaan negara adil.<sup>39</sup>

#### c. Pendidikan

Bagi Platon pendidikan sangat berperan untuk menghasilkan pemimpin yang ideal dan masyarakat yang adil. Pendidikan merupakan elemen fundamental politik Platon. Ada beberapa tujuan pendidikan

---

<sup>38</sup> A. Setyo Wibowo, *PAIDEIA: Filsafat Pendidikan-Politik Platon* (Yogyakarta: Kanisius, 2017) 236-241

<sup>39</sup> *Ibid.*, 262-263

diantaranya; pertama mengembangkan kebijaksanaan, pendidikan bertujuan untuk memupuk jiwa rasional individu, sehingga setiap individu mampu memahami bentuk ideal dan berpikir secara logis. Kedua menanamkan kebajikan, kebajikan yang dimaksudkan ialah keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Ketiga mempersiapkan pemimpin ideal, pendidikan berperan dalam menyeleksi dan melatih individu yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa-filsuf, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan keempat menciptakan masyarakat adil, melalui pendidikan Platon berharap dapat membangun masyarakat yang harmonis dimana setiap individu memenuhi peran mereka sesuai dengan kemampuan dan jiwanya.

Jadi pendidikan bagi Platon tidak sekedar tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan persiapan individu untuk menjadi pemimpin dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Visi Platon tentang pendidikan dalam politik memberikan inspirasi untuk membangun sistem pendidikan yang holistik dan berorientasi pada keabikan bersama.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu negara Ideal bagi Platon adalah negara yang di pimpin oleh filsuf dengan menggunakan akal (Idea). Seseorang yang memimpin dengan menggunakan akal, sistem pemerintahannya bukan untuk dirinya sendiri, dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memonopoli barang

---

<sup>40</sup> Ibid., 124

dan jasa di dalam negara. Tidak hanya sebatas itu, bagi Platon, seorang filsuf juga akan mengorbankan hak milik dan hak keluarganya, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.<sup>41</sup>

### C. Sistem Demokrasi

Konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno secara khusus di kota Athena pada abad ke-5 SM. Kota Athena pun dianggap sebagai negara demokrasi pertama di dunia. Di bawah kepemimpinan Cleisthenes, warga Athena secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui Majelis rakyat. Pada abad ke-17 dan ke-18 muncul konsep negara hukum, dimana kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya kepada rakyat. Pembatasan itu dilakukan dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan penguasa suatu negara harus berdasarkan serta berakar pada hukum.<sup>42</sup>

Setelah Athena, gagasan demokrasi menyebar ke berbagai belahan dunia, namun dengan bentuk dan perkembangan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, sosial, dan budaya sangat mempengaruhi implementasi sistem demokrasi di setiap tempat salah satunya Indonesia. Indonesia telah memulai berbagai bentuk pemerintahan sejak kemerdekaan.

---

<sup>41</sup> Ibid., 255

<sup>42</sup> Benny Bambang Irwan, "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia," *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2007): 56.

Setelah mengalami masa demokrasi liberal, orde baru, dan reformasi, Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sistem pemerintahan yang menganut demokrasi. UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, mengatur penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, mengatur pembentukan, penyelenggaraan, dan pembubaran partai politik. Dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia.<sup>43</sup>

Adapun prinsip-prinsip dasar demokrasi Indonesia ialah; kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan Hak Asasi Manusia, sistem multipartai, desentralisasi dan *check and balances*.<sup>44</sup> Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya sebatas mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila terutama sila

---

<sup>43</sup> Ambar Wida Astuti Aprillia dan Anita Trisiana, "Nilai Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945," *Global Citizen* 10, no. 1 (2021): 59-63.

<sup>44</sup> Agus Dedi, "Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Moderat* 7, no. 1 (2021): 3-4.

pertama yang menegaskan ketuhanan Yang Maha Esa dalam UU pasal 29. Dalam sila pertama ini, merujuk pada sistem teokrasi dan monarki yang ada di dalam Alkitab, dimana kekuasaan tertinggi hanya ada pada Allah.

#### **D. Konsep Berpolitik Gereja POUK**

Gereja POUK secara khusus jemaat Rio Riita berada dalam naungan PGI dan berpacu pada aturan PGI tersebut termasuk dalam berpolitik. Landasan berpolitik PGI menjadi patokan Gereja POUK Jemaat Rio Riita dalam menyikapi Politik yang ada di Indonesia. Dimana setiap Gereja yang ada di Indonesia mendukung Pancasila sebagai ideologi negara. Gereja harus turut mengupayakan persatuan dan melawan hal-hal yang dapat memisahkan berdasarkan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Seluruh Gereja juga perlu menegakkan sistem demokrasi yang substansial, yang menentang bentuk otoritarianisme, penyimpangan dari demokrasi, serta militerisme.<sup>45</sup>

Gereja-gereja yang ada di Indonesia termasuk Gereja POUK juga dipanggil dalam berpolitik. mempertahankan keadilan sosial di tengah masyarakat, memperjalkan nilai-nilai Pancasila serta menegakkan HAM di Indonesia. Gereja tidak boleh terlibat dalam politik kekuasaan secara khusus politik identitas. Harus bersifat mandiri, bertanggung jawab, berpacu pada nilai-nilai kristiani, santun dan beradab. Dengan demikian seluruh Gereja

---

<sup>45</sup> Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia *Dokumen Keesaan Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 2020) 30.

yang ada di Indonesia menjalankan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam berpolitik sebagai warga negara yang dewasa.<sup>46</sup>

Hal inilah juga yang menjadi landasan Gereja POUK Rio Riita dalam berpolitik sebagai masyarakat Indonesia yang dibawa naungan PGI. Akan tetapi, ada keistimewaan Gereja POUK Rio Riita secara khusus di lingkungan Polri-TNI AU, karena mengikuti netralitas berdasarkan aturan bagi Polri dan juga TNI dan berpolitik.

---

<sup>46</sup> Ibid., 31